

keberlangsungan mata pencahariannya. Menurut (Amelia & Priambodo, 2024) keberhasilan kolaborasi dapat dinilai dengan melihat bagaimana siklus kolaborasi tersebut berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, sampai hasil sementara yang telah dicapai. Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi *et al.*, 2025) yang menyebutkan bahwa hasil sementara dari kolaborasi pengelolaan bus Trans Metro Dewata belum dapat tercapai secara optimal dalam pencapaian tujuan maupun kebermanfaatan, terhadap keberadaan transportasi publik di provinsi Bali. Dengan demikian, proses kolaboratif dalam pelayanan transportasi publik bus Trans Banyumas dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini karena adanya kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan serta adanya rencana keberlanjutan layanan Trans Banyumas tahun depan. Kolaborasi ini tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada transportasi publik di Kabupaten Banyumas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut terkait dengan *collaborative governance* dalam pelayanan transportasi publik pada bus Trans Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek kondisi awal melalui kerjasama di masa lalu menunjukkan respon yang cukup baik dengan adanya dukungan melalui program dari Kementerian serta adanya MoU dan Kontrak Perjanjian di antara pemangku kepentingan. Namun, untuk sub aspek ketidakseimbangan sumber daya masih menghadapi tantangan yang dirasakan oleh beberapa pemangku kepentingan yaitu pihak operasional bus seperti PT Banyumas Raya Transportasi dan anggota konsorsium termasuk Kopata, PT Jaya Mandiri Transportasi, serta Organda dalam mempengaruhi kebijakan. Dengan demikian, pada aspek kondisi awal menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi di antara pemangku kepentingan, meskipun seiring berjalannya waktu masih ditemukannya beberapa kendala dalam

operasionalnya.

2. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif masih adanya otoritas yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di antara pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan di antara aktor non-pemerintah. Meskipun demikian, untuk komitmen di antara pemangku kepentingan sampai saat ini terus mendukung layanan bus Trans Banyumas. Hal ini didukung dengan adanya pihak yang mengawasi jalannya operasional yaitu PT Surveyor Indonesia, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
3. Pada aspek desain kelembagaan sudah adanya aturan dasar yang jelas dan dilakukan dengan transparan. Adanya dasar hukum melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi acuan dalam berkolaborasi. Selain itu terdapat MoU Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kontrak layanan bus Trans Banyumas menunjukkan sudah adanya aturan dasar dan setiap *stakeholder* telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sementara itu untuk transparansi sudah dilakukan melalui evaluasi setiap 6 (enam) bulan dalam setahun menandakan adanya keterbukaan di antara pemangku kepentingan.
4. Pada aspek proses kolaboratif sudah menunjukkan dengan baik yaitu adanya keselarasan mulai dari tahap dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, serta hasil sementara yang didapatkan. Pada dialog tatap muka sudah dilaksanakan cukup baik dengan adanya pertemuan langsung atau lewat *zoom meeting* ketika ada hal baru seperti perubahan rute. Pada sub aspek membangun kepercayaan juga sudah dilaksanakan melalui terjun langsung di lapangan untuk melihat situasi yang ada. Kemudian sub aspek komitmen terhadap proses juga sudah dilakukan yaitu ditandai adanya rencana *hand over* Trans Banyumas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sebelumnya merupakan subsidi dari Kementerian Perhubungan lewat APBN. Untuk sub aspek pemahaman bersama juga sudah selaras yaitu meningkatkan *load factor* Trans Banyumas. Dengan demikian, untuk hasil sementara yang telah

didapatkan dalam kolaborasi ini sudah ada dengan tersedianya layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau di Kabupaten Banyumas, namun masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan Trans Banyumas.

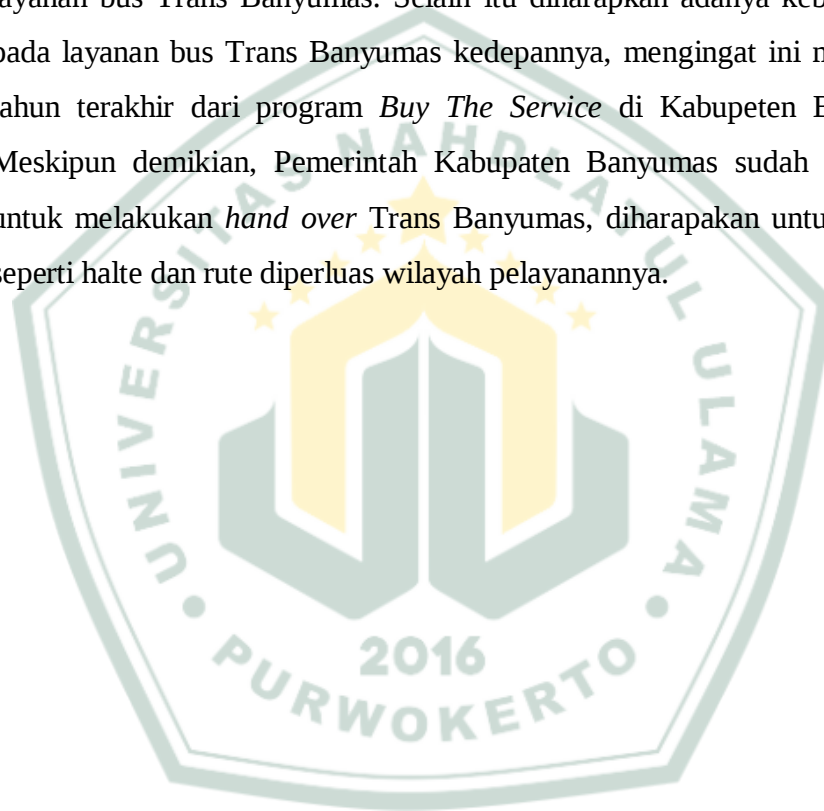
REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut terkait dengan *collaborative governance* dalam pelayanan transportasi publik pada bus Trans Banyumas, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pada aspek kondisi awal meskipun kolaborasi telah terjalin atas dasar kepercayaan dan dukungan program yang kuat di antara pemangku kepentingan, namun ketidakseimbangan sumber masih menjadi tantangan bagi pihak operator Trans Banyumas. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan kebijakan yang jelas dan mendukung dari pihak pemerintah, sedangkan dari pihak operator harus aktif memberikan data dan pengalaman yang riil melalui forum dialog rutin. Hal ini dilakukan agar ketidakseimbangan dijadikan sebagai penguat kolaborasi dan membangun ketergantungan yang saling menguntungkan.
2. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif meskipun komitmen telah terjaga di antara pemangku kepentingan, tetapi masih adanya dominasi otoritas pemerintah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, disarankan melibatkan aktor non pemerintah dengan membentuk forum diskusi yang transparan. Selain itu, pihak pemerintah sering melakukan terjun langsung lapangan untuk melihat kondisi riil dalam layanan bus Trans Banyumas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah ditentukan dapat beradaptasi dengan dinamika di lapangan dan kualitas layanan bus Trans Banyumas tetap terjaga.
3. Pada aspek desain kelembagaan dengan sudah adanya aturan dasar yang jelas dan transparansi melalui evaluasi, diharapkan setiap pemangku kepentingan mampu melaksanakan tanggung jawab dan perannya masing-masing. Selain itu, setiap pemangku kepentingan juga turut serta aktif dalam kegiatan evaluasi baik dari segi operasional ataupun organisasinya.

Hal ini agar semua pihak tetap bertanggung jawab sesuai kapasitasnya dan untuk memperkuat transparansi layanan Trans Banyumas.

4. Pada aspek kolaboratif proses meskipun sudah dilakukan dengan baik dengan adanya keselarasan dari tahap dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, serta hasil sementara yang didapatkan, diharapkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi harus lebih aktif dalam bersosialisasi dan melibatkan komunitas pengguna layanan bus Trans Banyumas dalam forum diskusi. Hal ini tentunya untuk dapat meningkatkan *load factor* pada layanan bus Trans Banyumas. Selain itu diharapkan adanya keberlanjutan pada layanan bus Trans Banyumas kedepannya, mengingat ini merupakan tahun terakhir dari program *Buy The Service* di Kabupaten Banyumas. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah berencana untuk melakukan *hand over* Trans Banyumas, diharapkan untuk fasilitas seperti halte dan rute diperluas wilayah pelayanannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Retno S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Banga, Wempy. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hisanuddin, La Ode S., & Andriani, R. (2023). *Perkembangan Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Medan: CV Dharma Persada Dharmasraya.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertasi Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LPPM Veteran Yogyakarta Press.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Pasalong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collanorative Governance In Theory And Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam *Collaborative Governance* Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 48-64.
- Fatmaningsih, F., & Ramadhan, D. M. (2023). Strategi Adaptasi Sopir Angkot Purwokerto Dalam Bertahan Hidup Di Tengah Kehadiran Trans Banyumas. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 7(1), 183-197.

- Hermansyah, H., Zubaidah, S., Jumroh, J., & Ahmadi, Z. (2024). Strengthening Collaborative Governance In The Department Of Transportation: Implementation And Enforcement Levies. *Journal Of Contemporary Governance And Public Policy*, 5(2), 193-216.
- Hidayah, S., & Fatmawati. (2023). Collaboration Governance In Public Transportation Policy Implementation: Literature Review Analysis. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*. 620-626.
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1). 23-31.
- Islamy, L. O. S., & Andriani, R. (2022). Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1). 1-23.
- Kodariyah, L., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2022). Kolaborasi Stakeholder Dalam Melaksanakan Program Layanan Transportasi Integasi Jaklingko Di Provins DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(01), 1–9.
- Kurniawan, A. (2025). Sosialisasi Layanan Transportasi Umum Trans Banyumas Program *Buy The Service* Kementerian Perhubungan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 4(1), 18-28.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140-148.
- Nafiah, A.F., & Setiawan, P. R. (2023). Evaluasi Kinerja Keterpaduan Layanan Bus Angkutan Umum Massal Antar Operator. *Jurnal Teknik*, 12(2), 97-102.
- Noer, A., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Metro Trans Jabar Untuk Mengatasi Kemacetan Di Cekungan Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Dan Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 327-339.
- Parlina, R. (2022). Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Kolaborasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistematik Literatur Review). *Jurnal Arajang*, 5(1), 58-77.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 137-148.
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61-77.
- Pratiwi, A. A. M. S. S., Yudharta, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Proses *Collaborative Governance* Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Bus Trans Metro Dewata Di Kawasan Sarbagita Bali. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10). 7569-7582.
- Rabbani, S., & Hanani, R. (2025). Proses Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Tata Kelola Mikrotrans Dalam Sistem Jaklingko Kota Jakarta Rute Jak. 36 Cilangkap-Cililitan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 329-352.
- Rahma, H. A., Rosyadi, S., Gunarto, G., & Simin. (2024). Collaborative Governance in Management of the JakLingko Program (Case Study on Public Transportation Management in DKI Jakarta). *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues*, 1(2), 36-46.
- Ridho, M. R., & Jaelani, R. (2025). *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(10). 1-14.
- Rohmah, W., Ramadhani, M., & Winarno, B. (2024). Pentingnya Integrasi Transportasi Publik Di Kota Surakarta Sebagai Kota Urbanisasi Di Jawa Tengah. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 3(1), 45-54.
- Saputra, S. A., Murti, I., & Puspaningtyas, A. (2024). Implementasi Program Teman Bus Sebagai Transportasi Publik Di Kota Surabaya. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau*, 4(1), 1-16.
- Satyadharma. M., & Susanti, N. (2024). *Collaborative Governance* dalam

- Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Literasi dan Komunikasi*. 4(1), 1-14.
- Sinaga, R., M. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation Universitas Islam Riau).
- Soeparyanto, T. S., & Masikki, S. M. H. (2023). Kinerja Angkutan Umum Penumpang Perkotaan Di Kota Kendari. *Jurnal Transportasi*, 23(2), 93-102.
- Sutikno, C., & Naufal, A. (2023). Proses *Collaborative Governance* Penanggulangan Stunting Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(04), 101–111.
- Tobing, A. P. L., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Implementasi Program Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Pada Bus Trans Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 372–388.
- Trihanggara, B. S., & Kusumasari, B. (2023). Efektivitas Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan MRT (Moda Raya Terpadu) Jakarta: Analisis Isi Media Sosial Twitter Tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 66-83.
- Wibowo, A. N. F. A. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Pelayanan Transportasi Publik (Study BRT Trans Semarang). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3). 1-18.
- Yahya, A. S., Kusuma, D., Ismunarta, I., & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kemacetan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1). 54-82.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

Anugrah, Abri. 5 Desember 2021. Retrieved from DetikNews.com. Diakses pada tanggal 8 Juli 2025. Tersedia <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

5841284/pengumuman-lur-bus-trans-banyumas-mulai-beroperasi-hari-ini?utm_source=chatgpt.com

Juni, R. 31 Januari 2025. Retrieved from RadarBanyumas.disway.id. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025. Tersedia <https://radarbanyumas.disway.id/read/129079/peningkatan-sarana-halte-pasar-pon-tunggu-kepastian-anggaran>

Kementerian Perhubungan. 14 Oktober 2024. Retrieved from dephub.go.id. Diakses pada tanggal 22 Februari 2024. Tersedia <https://dephub.go.id/post/read/menhub--angkutan-umum-perkotaan-indonesia-berkembang-pesat-dalam-10-tahun-terakhir>

Prabowo, Dimas. 24 Juli 2024. Retrieved from RadarBanyumas.com. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025. Tersedia <https://radarbanyumas.disway.id/read/114043/trans-banyumas-akan-melayani-hingga-kota-lama-banyumas>

Sumarwoto. 24 April 2025. Retrieved from Jateng.antaranews.com. Diakses pada tanggal 17 September 2025. Tersedia <https://jateng.antaranews.com/berita/579185/pemkab-banyumas-upayakan-keberlanjutan-layanan-bus-bts-trans-banyumas>

Sumarwoto. 26 Juni 2025. Retrieved from Jateng.antaranews.com. Diakses pada tanggal 24 Juli 2025. Tersedia <https://jateng.antaranews.com/berita/587821/bupati-banyumas-minta-kemenhub-perpanjang-subsidi-trans-banyumas>

Zahra, Nicky. 7 Februari 2025. Retrieved from banyumas.suamerdeka.com. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025. Tersedia <https://banyumas.suamerdeka.com/banyumas/0914507947/jadi-primadona-di-kota-purwokerto-ini-keunggulan-trans-banyumas-yang-dirasakan-pengguna?page=2>